

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH
RENCANA PEMBANGUNAN TINGKAT DESA**

*(Studi Kasus : Musrenbang Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja
dan Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)*

SKRIPSI

Diajukan oleh:

**CHAIDIR ALI
NIM. 170801042**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**



**PRODI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN TINGKAT DESA**

*(Studi Kasus: Musrenbang Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja dan Gampong Beurawe
Kota Banda Aceh)*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Politik

Oleh :

CHAIDIR ALI
NIM. 170801042

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP: 197309212000032004

Pembimbing II


Melly Masni, M. IR
NIP: 199305242020122016

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN TINGKAT DESA**

*(Studi Kasus: Musrenbang Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja dan Gampong Beurawe
Kota Banda Aceh)*

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik
Pada Hari/ Tanggal : Jum'at, 6 Agustus 2021 M
27 Dzulhijah 1442 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

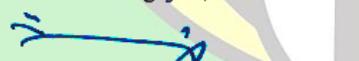
Ketua,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004

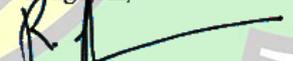
Sekretaris,


Melly Masri, M. IR
NIP. 199305242020122016

Penguji I,


Muhammad Thalaf, Lc., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Penguji II,


Rizkika Lhera Darwin, S.IP., MA
NIP. 198812072018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Dr. Enifa Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197809172009121006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chaidir Ali

NIM : 170801042

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Keterlibatan Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (Studi Kasus Musrenbang Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Dan Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Chaidir Ali

ABSTRAK

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah sarana pemerintah di semua tingkatan, untuk menghimpun aspirasi pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, selama ini kegiatan Musrenbang di semua tingkatan, masih menghadapi rendahnya partisipasi dari kelompok-kelompok perempuan, bahkan partisipasi mereka cenderung dianggap sebagai simbolik saja. Konsekuensinya, banyak program-program yang direncanakan bersifat bias gender, di mana pembahasan lebih didominasi oleh rencana-rencana pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membandingkan tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di Gampong Beurawe dan Gampong Jawa yang memiliki tingkat pembangunan yang cukup bertolak belakang untuk melihat tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di kedua gampong tersebut. Selain itu, akan dilihat apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya partisipasi di kedua gampong tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapat dari dua variable yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di Gampong Beurawe lebih baik dibandingkan dengan tingkat partisipasi perempuan di Gampong Jawa dalam Musrenbangdes di kedua gampong. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi tersebut adalah faktor pendidikan, budaya, dan politik.

Kata Kunci: Musrenbangdes, Partisipasi Perempuan, Gampong Beurawe, Gampong Jawa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Keterlibatan Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (*Studi Kasus : Musrenbang Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh*)”. Shalawat beriringi salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangandan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendo'akan, Menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.

4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A Selaku pembimbing I dan Melly Masni, M. IR selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam Memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada orang-orang terdekat Hani Nadiya Putri, Yulis Saputra, Mujiburrahman, Aldis Peristiwa Dari, Diah Ayu Nabila Karimah, Muhammad Zaldi, Ikhwanur Rijal dan teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2017, dan sahabat-sahabat penulis dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan Kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun Secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

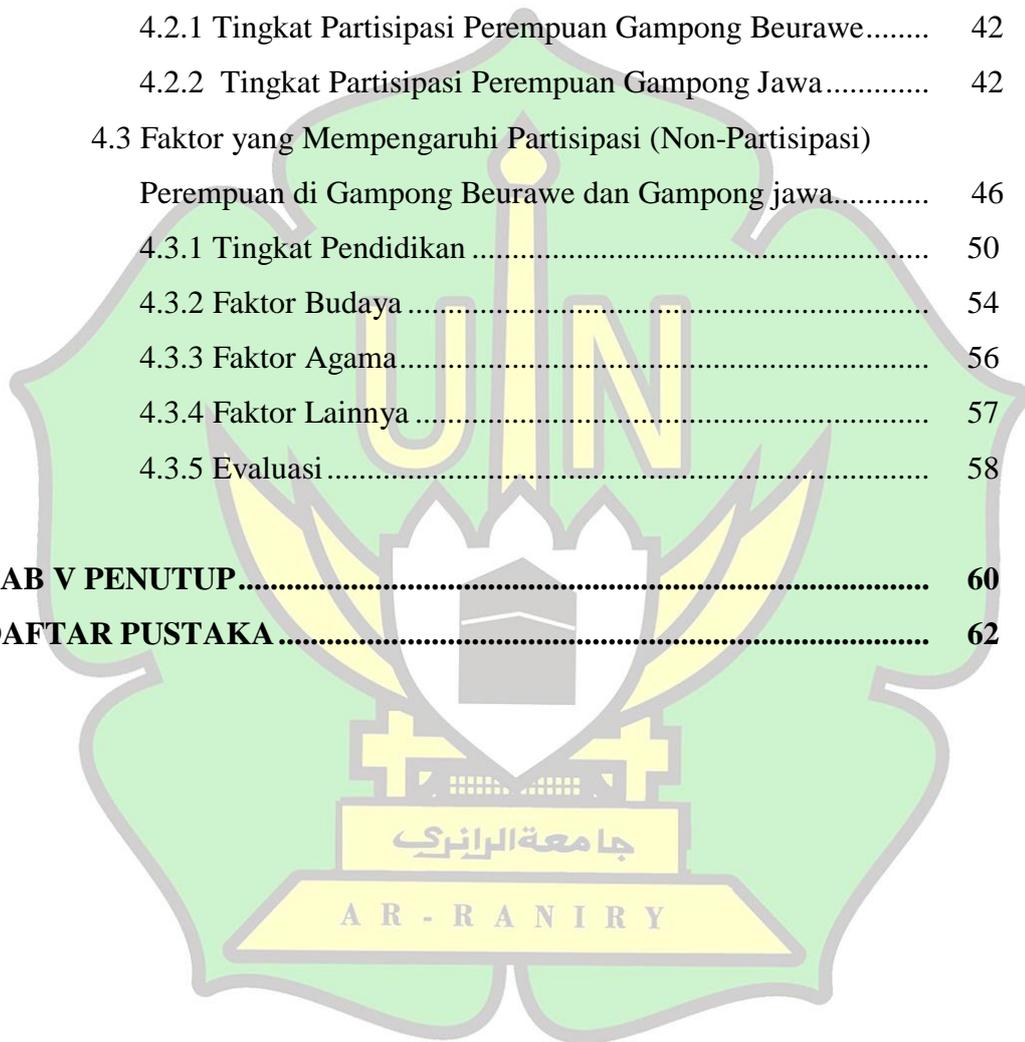
Banda Aceh, 27 Oktober 2020
Penulis,

CHAIDIR ALI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masala.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian yang Relevan.....	7
2.2 Landasan Konseptual	7
2.2.1 Partisipasi	11
2.2.2 Bentuk – Bentuk Partisipasi.....	15
2.2.3 Tingkat Partisipasi.....	18
2.2.4 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.....	22
2.2.5 Budaya.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Informan Penelitian.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Profil Kota Banda Aceh Sosial	34
4.1.1 Gampong Beurawe.....	37
4.1.2 Gampong Jawa.....	40
4.2 Tingkat Partisipasi Perempuan Gampong Beurawe dan Gampong Jawa dalam Musrenbang	42
4.2.1 Tingkat Partisipasi Perempuan Gampong Beurawe.....	42
4.2.2 Tingkat Partisipasi Perempuan Gampong Jawa.....	42
4.3 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi (Non-Partisipasi) Perempuan di Gampong Beurawe dan Gampong Jawa.....	46
4.3.1 Tingkat Pendidikan	50
4.3.2 Faktor Budaya	54
4.3.3 Faktor Agama.....	56
4.3.4 Faktor Lainnya	57
4.3.5 Evaluasi	58
BAB V PENUTUP.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang sering dikenal dengan sebutan Musrenbang, adalah sarana pemerintah di semua tingkatan, untuk menghimpun aspirasi pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat. Di sisi lain Musrenbang merupakan cerminan dari praktik partisipasi warga sekaligus arena akuntabilitas pemerintahan, baik dari jajaran pimpinan daerah, kalangan masyarakat dari berbagai komponen, dan kalangan usaha/bisnis, dapat bertemu dan berdialog mengenai program daerahnya dengan tujuan Musrenbang sebagai penyempurna dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).¹

Musrenbang baik dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten/kota itu semua merupakan forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Jadi implementasi dari Musrenbang daerah berpedoman kepada surat edaran bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS dan menteri dalam negeri Nomor: 1354/M.PPN/13/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan perencanaan partisipatif daerah. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musrenbang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi.²

¹ Nandang dan Saeful, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. 2008. Hal. 15

² Ibid

Pada tingkat desa/kelurahan, sebagai salah satu bentuk pencapaian kesepakatan tentang prioritas program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan juga untuk menghimpun aspirasi pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat yang mana advokasi masyarakat akan dibawa pada tingkatan yang lebih tinggi. Musrenbang tingkat desa/kelurahan akan menjadi wadah untuk mengaktualisasikan suara/aspirasi masyarakat pada pemerintahan yang lebih tinggi. Musrenbang tingkat desa/kelurahan dilaksanakan setiap tahun.³ Adapun beberapa tujuan dari Musrenbang yaitu, pertama untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan pengambilan keputusan bersama-sama pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan, kedua Musrenbang tingkat Kecamatan bertujuan untuk membahas prioritas permasalahan hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, yang ketiga melakukan klasifikasi atas prioritas permasalahan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan yang terakhir adalah menetapkan daftar urutan prioritas permasalahan yang akan diusulkan pada forum SKPD.⁴

Dalam pelaksanaannya Musrenbangdes tidak hanya melibatkan kaum laki laki saja namun juga harus melibatkan perempuan. Model pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan ini telah ditegaskan dalam UU desa. Ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan tersebut memberi hak

³ ibid

⁴ Nandang dan Saeful, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. 2008. Hal. 18

untuk melibatkan perempuan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya keterlibatan perempuan, diharapkan akan menghilangkan diskriminasi gender terhadap perempuan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) disebutkan bahwa perempuan harus dipastikan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbang, setidaknya memenuhi minimal 30% dari total peserta yang hadir. Bahkan, perwakilan perempuan harus dipastikan masuk ke dalam setiap pengiriman delegasi di tahapan Musrenbang yang lebih tinggi.

Dengan berpartisipasinya perempuan di setiap Musrenbang, perempuan dapat berpartisipasi untuk memasukkan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi perempuan dalam proses demokrasi adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok dan golongan baik itu laki-laki ataupun perempuan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di segala tingkatan.

Masyarakat desa khususnya perempuan seharusnya mengetahui pentingnya keterlibatan perempuan dalam musrenbangdes. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mensinergiskan rencana pembangunan desa yang berbasis ramah gender guna meningkatkan kesejahteraan perempuan di desa. Dalam forum musrenbang tersebut perempuan memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah desa untuk kemajuan kaum perempuan di

masa depan. Namun demikian, menurut kemendes selama ini kegiatan Musrenbang, baik pada tingkat desa/gampong, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi maupun nasional keterlibatan perempuan masih kurang partisipatif, bahkan dianggap sebagai simbolik saja. Karena itu, ruang partisipasi yang telah disediakan dengan legislasi yang cukup jelas ini belum banyak dimanfaatkan oleh kaum perempuan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tohopi, adapun faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan dalam berdemokrasi adalah lingkungan pendidikan.⁵ Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai perempuan, semakin tinggi pula partisipasi yang bisa dilakukan dalam ranah publik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melihat dan membandingkan tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di Gampong Jawa dan Gampong Beurawe untuk memeriksa apakah tingkat pendidikan turut mempengaruhi partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di kedua gampong tersebut. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan perempuan di kedua gampong tersebut cukup signifikan. Di Gampong Beurawe misalnya, persentase perempuan yang mencapai pendidikan hingga perguruan tinggi adalah sebesar 28% dari total perempuan di gampong tersebut. Hal ini cukup berbeda dengan tingkat pendidikan perempuan di Gampong Jawa di level perguruan tinggi yang hanya 9% dari keseluruhan perempuan di gampong tersebut. Disamping itu, Gampong Beurawe telah dinobatkan sebagai desa teladan

⁵ Ridwan Tohopi, Lingkungan pendidikan mempengaruhi perempuan dalam berdemokrasi, 2015, Hlm. 97

dan Syariah pada tahun 2020, sementara Gampong Jawa merupakan salah satu desa di kecamatan Kutaraja yang masih tertinggal dari segi pembangunannya. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya infrastruktur seperti kurangnya ketersediaan sanitasi umum dan belum ada gedung yang mendukung untuk pertemuan ibu-ibu PKK. Oleh karena itu menarik untuk melihat apakah ada perbedaan tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di Gampong Beurawe dan Gampong Jawa dimana kedua gampong ini memiliki tingkat pembangunan yang cukup berbeda satu sama lain.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis menyimpulkan bebarapa rumusan masalah.

1. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan Gampong Jawa dan Gampong Beurawe dalam Musrenbang?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi (non-partisipasi) perempuan di kedua gampong tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan Gampong Jawa dan Gampong Beurawe dalam Musrenbang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi (non-partisipasi) perempuan di kedua gampong tersebut

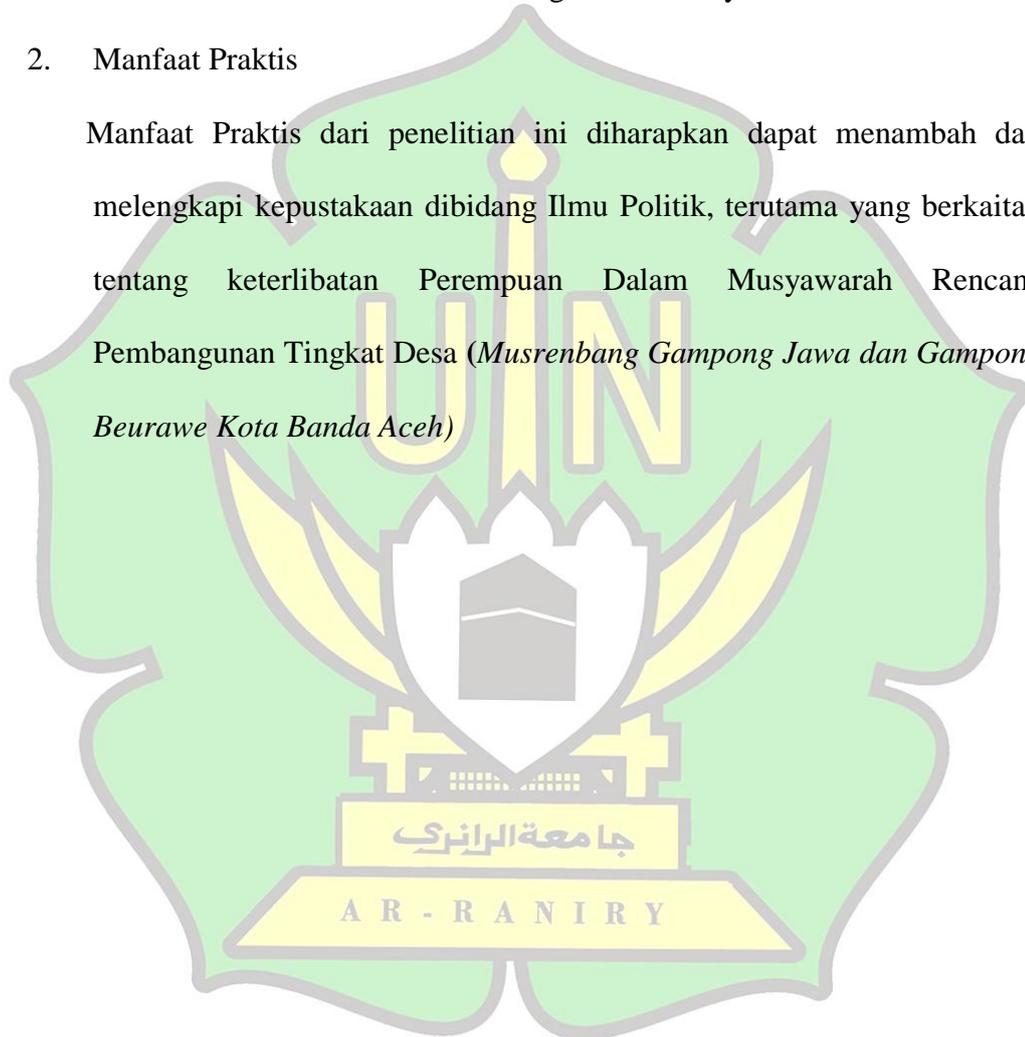
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang keterlibatan Perempuan Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (*Musrenbang Gampong Jawa dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh*)



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian yang Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Wandi Saputra dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Tembeling kecamatan teluk kabupaten bintang tahun 2015”. Penelitian ini mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa tembeling diharapkan dapat memberikan sumbangsuhnya baik dalam bentuk pemikiran berupa masukan dan saran dan juga bentuk tenaga untuk bersama pemerintah Desa dalam perencanaan dan pembangunan desa. hal ini perlu dilakukan karena masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam menyampaikan aspirasinya yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 Bab VI, pasal 80 ayat 1 mempertegas lagi bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat, ayat 2 Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musrenbang desa. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang nyata tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang desa di Desa Tembeling dan teori yang peneliti gunakan yaitu teori Tangkilisan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari:

- 1) Partisipasi dalam memberikan tanggapan informasi.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- 3) Partisipasi masyarakat dalam operasional pembangunan

4) Partisipasi masyarakat dalam menerima, memelihara hasil pembangunan.

Teori ini diperkuat dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan pasal 1 angka 7 dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 68 tentang Desa, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti sampaikan temuan – temuan yang terjadi di Desa Tembeling, yaitu:

- 1). lemahnya sosialisasi dari pemerintah Desa kepada masyarakat tentang musrenbang desa.
- 2). lemahnya kerjasama antara Kepala Desa dan BPD dalam mensosialisasikan tentang besarnya peran masyarakat dalam partisipasi secara langsung dalam menyampaikan aspirasinya
- 3). diakibatkan oleh kesibukan masyarakat desa yang bekerja sehingga tidak hadir secara langsung dalam musrenbang desa
- 4). karena banyaknya usulan dari masyarakat namun pelaksanaan dari pemerintah desa sangat kurang, ini juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. masyarakat menjadi jenuh dan malas karena banyak usulan yang diajukan namun pelaksanaan dari desa kurang.

Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi Maryam dengan judul Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus). Dalam penelitian ini menjelaskan Secara umum partisipasi masyarakat dalam Murenbang desa Kebumen tahun 2014 adalah „rendah“ dengan karakteristik: Pertama, Partisipasi masyarakat dalam kehadiran pada forum Musrenbang sudah cukup tinggi yaitu mencapai 73% (tujuh puluh tiga persen). Kedua, Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam Musrenbang masih rendah. Ketiga, Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Kebumen masuk ke Step (5) Placation yaitu pemegang kekuasaan mengizinkan warga untuk memberikan masukan atau pandangannya, tetapi tetap mempertahankan proses pengambilan keputusan berada ditangan pemegang kekuasaan. Kemudian, terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa Kebumen tahun 2014 secara umum juga „rendah“ yang memiliki karakteristik: Pertama, pelaksanaan program pembangunan belum dilaksanakan secara efektif dan partisipatif. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan masuk ke Step (2) Therapy. Step ini menggambarkan level nonpartisipasi yang direayasa oleh beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi murni. Dimana dalam pelaksanaan program pembangunan desa masyarakat bersikap pasif; hanya menunggu instruksi dari aparat desa sehingga masih bersifat top-down.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ahmad Mustanir dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian dan pengamatan peneliti memperlihatkan partisipasi masyarakat berada dalam

kategori kurang berpartisipasi pada kegiatan musrenbang disebabkan karena Komunitas Towani Tolotang yang mayoritas di Kelurahan Kanyuara lebih mendengarkan apa yang dikatakan Uwa dan Uwata sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dibandingkan apa yang di sampaikan kepala kelurahan yang bukan dari Komunitas Towani Tolotang. Sedangkan faktor sosial budaya seperti norma-norma, nilai kepercayaan, pengetahuan, sikap, status pernikahan, usia, jenis kelamin, dan simbol-simbol yang ada dalam masyarakat berada dalam kategori berpengaruh dan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kelurahan Kanyuara karena kegiatan tersebut dalam kehidupan Komunitas Towani Tolotang juga dianggap merupakan peribadatan kepada Dewata, besar kecilnya partisipasi anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan akan mempengaruhi kehidupan mereka kelak dikemudian hari.

2.2 Landasan Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti.⁶ Menurut Kerlinger dalam buku Teori Komunikasi, oleh Rakhmat menyatakan bahwa: Teori merupakan suatu himpunan konstruk yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Sementara itu ia juga mengatakan fungsi dari teori itu sendiri ialah untuk membantu

⁶ Nawawi, Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, 1995. Yogyakarta: Gadjahmada University. Hal. 39

penelitian menerangkan fenomena sosial atau fenomena alamiah yang menjadi pusat penelitiannya, serta memberikan ketajaman analisis peneliti akan masalah yang diteliti.⁷

2.2.1. Partisipasi

Secara umum, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap suatu kegiatan. Tilaar mendefinisikan partisipasi sebagai “wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.”⁸ Sedangkan menurut Keith Davis partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.⁹

Selain itu, partisipasi dapat diartikan pula sebagai bentuk keikutsertaan secara aktif dan bermakna, dari massa penduduk atas tingkatan-tingkatan yang

⁷ Karlinger, *Asas-asas Penelitian Behaviour*, 2004. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 6

⁸ Agnes Pratitis Offi, DianaDewiSartika, dan Yunindyawati.2016. Partisipasi Perempuan dalam perencanaan pembangunan. Hlm. 145

⁹ Sigalingging, Angelius Henry dan Warjio. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 hlm: 119

berbeda.¹⁰ Tingkat keikutsertaan tersebut dapat dikelompokkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Berpartisipasi pada saat proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Ikut serta dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela, dan
3. Berperan aktif dalam pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek.

Menurut Hamidjoyo, partisipasi pada dasarnya mengandung tiga pengertian yaitu:¹¹

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Memperoleh kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.
3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitas dan otonomitas.

Dengan demikian, partisipasi memiliki maksud sebagai sebuah proses keikutsertaan, keterlibatan, kebersamaan kalangan masyarakat dalam menentukan atau mengambil keputusan, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal tersebut cukup penting

¹⁰ Ibid Hlm. 120

¹¹ Sigalingging, Angelius Henry dan Warjio. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Halaman: 119-120

keikutsertaan, maupun keterlibatan masyarakat khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan, untuk mencegah penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat sepihak (hanya mengakomodasi kepentingan laki-laki).

Berdasarkan beberapa pengertian tentang partisipasi di atas, maka ada tiga unsur penting dalam partisipasi menurut Sigalingging dan Warjio yaitu:¹²

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi dana kepada usaha untuk mencapai tujuan kelompok, hal ini berarti terdapat rasa senang/bahagia, atas kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus memiliki tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Conyers menyatakan 3 alasan utama mengapa partisipasi mempunyai arti yang sangat penting yaitu :¹³

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa hadirannya program pembangunan akan mengalami kegagalan.

¹² Ibid, Halaman: 127

¹³ Fadil, Fathurrahman. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2 .Hlm:255

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turut urun rembung (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat yang juga merupakan bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan, ada beberapa bentuk partisipasi menurut para ahli.

Menurut Vaneklasen & Miller ada 7 bentuk partisipasi yang terbagi atas:¹⁴

1. Partisipasi Simbolis: berpartisipasi dengan hadir dan duduk dalam lembaga resmi tanpa mengajukan gagasan dan tidak memiliki kekuasaan yang sesungguhnya.
2. Partisipasi Pasif: berpartisipasi dengan diberi informasi atas apa yang sudah diputuskan dan apa yang sudah terjadi. Masyarakat hanya menerima hasil

¹⁴ Sigalingging, Angelius Henry dan Warjio. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Hlm: 125

keputusan semata-mata, karena tanggapan mereka tidak didengarkan sehingga informasi berjalan satu arah.

3. Partisipasi Konsultatif: berpartisipasi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan.
4. Partisipasi dengan Insentif Material; Partisipasi dengan cara menyumbangkan tenaganya untuk mendapatkan makanan, uang atau imbalan lainnya.
5. Partisipasi Fungsional: berpartisipasi karena adanya permintaan dari lembaga eksternal untuk memenuhi tujuan.
6. Partisipasi Interaktif: berpartisipasi dalam mengembangkan dan menganalisa rencana kerja.
7. Pengorganisasian Diri: berpartisipasi dengan merencanakan aksi secara mandiri.

Selanjutnya Menurut Keith Davis menyatakan bahwa bentuk partisipasi terdiri dari:¹⁵

1. Partisipasi Pikiran (Psychological participation)
2. Partisipasi Tenaga (Physical participation)
3. Partisipasi Pikiran dan tenaga (Psychological dan Physical participation)
4. Partisipasi Keahlian (Participation with skill)
5. Partisipasi Barang (Material participation)
6. Partisipasi Uang (Money participation).

¹⁵ Ibid, Hlm. 127

Berdasar bentuk partisipasi diatas Ericson membagi tiga tahap bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam pembangunan yaitu:¹⁶

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah keikutsertaan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*) merupakan keikutsertaan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu program. Masyarakat dapat memberikan tenaga, dana ataupun material/barang serta gagasan sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*) merupakan keikutsertaan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu program setelah program tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan dana untuk mengoperasikan dan memelihara program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dalam melakukan bentuk partisipasi yang baik Keith Davis mengemukakan tujuh prasyarat untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif, yaitu sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Sanjaya, Roy Topan. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara. Hlm; 125

1. Adanya waktu.
2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.
3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.
4. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sepadan.
5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.
6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Adanya kebebasan dalam kelompok, tidak adanya pemaksaan atau penekanan.

2.2.3 Tingkat Partisipasi

Menurut Arnstein tingkatan/level partisipasi masyarakat dapat dilihat dari wewenang dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, maupun dalam proses pengambilan berbagai keputusan, yang digolongkan menjadi tingkatan non-partisipasi hingga kekuasaan warga (citizen power).¹⁸ Tingkatan partisipasi tersebut, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang, dan tanggung jawab yang bisa dilihat dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹

¹⁷ Ibid. Hlm. 128

¹⁸ Eka Saputra, Yudiansyah, 2016, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa(kasus:Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. hlm.7

¹⁹ osyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian 2011, Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan, Jurnal

Adapun tingkatan yang di usulkan oleh Arnstein :²⁰

- a) *Manipulation* atau Manipulasi. Tingkat partisipasi paling rendah dengan mengatasnamakan partisipasi seseorang/masyarakat, partisipasi program secara formalitas termasuk pada bagian partisipasi program. Tujuannya adalah untuk dipakai namanya saja sebagai anggota dan dipakai sebagai alat publikasi oleh pihak penguasa.
- b) *Therapy* atau Terapi. Pada tingkatan ini, pihak pembentuk program menganggap ketidak berdayaan sebagai penyakit mental. Berpura-pura mengikutsertakan masyarakat dalam suatu perencanaan, mereka sebenarnya menganggap masyarakat sebagai sekelompok orang yang membutuhkan pengobatan, meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan, namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk mengobati lukanya dan bukan untuk mencari penyebab lukanya.
- c) *Informing* atau Pemberian Informasi. Tingkatan ini merupakan tahap pemberian informasi kepada masyarakat akan hak, tanggung jawab, dan pilihan mereka yang merupakan langkah awal yang cukup penting dalam pelaksanaan partisipasi. Namun seringkali pemberian informasi dari penguasa bersifat satu arah, yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik dan negosiasi. Apalagi

Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 05, No. 01, ISSN 1978-4333. hlm. 54

²⁰ Eka Saputra, Yudiansyah, 2016, Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Hlm. 7

pemberian informasi tersebut dilakukan pada akhir perencanaan, sehingga masyarakat memiliki sedikit kesempatan mempengaruhi program. Pemberian informasi ini biasa dilakukan dengan media pemberitaan yaitu brosur dan poster.

d) *Consultation* atau Konsultasi. Pada tingkatan ini penguasa meminta pendapat masyarakat, namun konsultasi ini masih merupakan partisipasi semu, karna tidak ada jaminan bahwa ide mereka akan diperhatikan. Cara yang sering dilakukan dalam tingkat ini adalah survei pendapat masyarakat, pertemuan warga, dan dengan mendengar pendapat. Masyarakat hanya dianggap sebagai abstraksi statistik, karena partisipasi hanya diukur dari frekuensi kehadiran pada pertemuan. Dengan demikian, penguasa telah merasa memiliki bukti bahwa mereka telah mengikuti rangkaian proses yang mengikutsertakan masyarakat.

e) *Placation* atau Penentruman. Pada tingkatan ini, masyarakat sudah memiliki beberapa pengaruh meskipun pada beberapa hal pengaruh tersebut tidak memiliki jaminan akan diperhatikan. Masyarakat diperbolehkan untuk memberikan usulan dan masukan akan tetapi penguasa yang berwenang menentukannya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan memasukan beberapa nama masyarakat miskin ke dalam suatu lembaga. Jika mereka tidak bertanggung jawab, maka mereka akan dengan mudah dikalahkan dan diakali karena jumlah mereka relative sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota yang berasal dari kalangan penguasa yang menjadi pengurus lembaga tersebut.

- f) *Partnership* atau Kemitraan. Tingkatan ini kekuasaan disalurkan atas kesepakatan bersama antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat. Mereka sepakat sama-sama memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan adanya kesepakatan tersebut aturan dibuat dengan mekanisme take and give, maka tidak dibenarkan adanya perubahan-perubahan secara sepihak.
- g) *Delegated Power* atau pelimpahan Kekuasaan. Pada tingkatan ini masyarakat diberikan kewenangan, sehingga memiliki kekuasaan dalam menentukan suatu keputusan, selain itu, masyarakat memegang peran penting dalam menjamin akuntabilitas program tersebut. Untuk memecahkan perbedaan/masalah, pemegang kekuasaan tidak perlu meresponnya akan tetapi mengadakan proses tawar-menawar dengan masyarakat.
- h) *Citizen Control* atau masyarakat yang mengontrol. Pada tingkatan ini, masyarakat menginginkan adanya jaminan kewenangan untuk mengatur program atau kelembagaan diberikan kepada mereka. bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspek-aspek manajerial dan bisa mengadakan negosiasi apabila pihak ketiga akan mengadakan perubahan. Dalam hal ini masyarakat dapat berhubungan langsung dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan tanpa melewati pihak ketiga.

2.2.4 Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Perempuan merupakan makhluk sosial yang mempunyai sifat lemah lembut, sabar, penyayang, cantik, keibuan dan emosional serta merupakan sumber perdamaian dan keadilan. Dalam perencanaan pembangunan, partisipasi perempuan merupakan hal yang cukup penting agar tercapainya pembangunan yang berdasarkan kepentingan masyarakat. Agnes dkk mendefinisikan bahwa partisipasi perempuan merupakan suatu wujud dari keikutsertaan masyarakat khususnya perempuan dalam aktivitas berupa perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan.²¹

Berbagai bentuk partisipasi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dijamin perlindungan haknya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada Pasal 27 ditegaskan bahwa, semua warga Negara Indonesia, mendapatkan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak.²² Untuk Provinsi Aceh secara lebih khusus, hak-hak ini dijamin dalam Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan. Hak-hak perempuan tersebut dijelaskan pada Pasal 7 dan 8 yaitu: perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran; berhak untuk memilih, dipilih dan diangkat dalam pekerjaan; berhak memperoleh pekerjaan dan jabatan; berhak memperoleh perlindungan

²¹ Agnes, Pratitis Offi, Diana Dewi Sartika, Yunindyawati. Partisipasi Perempuan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Hlm: 145

²² Djumati, Hunia dkk, 2015. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal administrasi negara Vol. 1 No. 010.

khusus dalam pelaksanaan pekerjaan; berhak mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan; berhak menduduki jabatan politik; berhak melakukan berbagai aktifitas politik; berhak menduduki jabatan setiap jenjang kepengurusan partai politik; dan berhak di calonkan sebagai anggota legislatif, semua hak-hak perempuan tersebut sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya, untuk memperkuat keikutsertaan perempuan dalam pembangunan maka dikeluarkan Inpres RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang mendefinisikan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam hal ini dapat diartikan tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pembangunan.

Pembelajaran dan sosialisasi pemilu dari suatu lingkungan pendidikan yang baik dan benar maka hasilnya juga akan lebih baik, sebab perlakuan proses pendidikan dalam berdemokrasi merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan wajib dilakukan agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu. Selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat Indonesia masih perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah memberikan petunjuk yang benar terkait

pamili bukan justru mencari keuntungan semata yang dapat merugikan masyarakat sehingga masyarakat hanya dijadikan boneka permainan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perempuan juga jangan dianggap hanya sebagai unsur pelengkap dalam sistem kuota dalam perpolitikan sehingga dalam kancah berdemokrasi fungsi perempuan hanya sebagai porsi *affirmative action* 30 persen, harusnya hak perempuan bias setara dengan kaum pria yaitu *fifty- fifty* persen.

Dalam dunia politik, Pendidikan politik dapat dilakukan oleh partai politik sebagai salah satu sarana kaderisasi politik perempuan. Pendidikan politik ini ditujukan bagi kader-kader dari partai tersebut dan konstituen perempuan yang mereka wakili.

Berbagai organisasi perempuan terus berusaha untuk mengangkat derajat keterwakilan perempuan, baik dalam kegiatan organisasi maupun pemuatan intelektual. Sebab melalui pemahaman intelektual yang tinggi, perempuan akan mendapatkan Pendidikan politik yang baik sehingga dapat menciptakan masyarakat perempuan yang cerdas dalam berdemokrasi.

Sejumlah organisasi perempuan tengah berusaha untuk merubah realitas ini dengan menyelenggarakan program pendidikan pemilih yang mengulas tak hanya faktor politik dan budaya, tetapi juga faktor agama yang mempengaruhi peran politik perempuan. Sejak tahun 1999, organisasi-organisasi ini telah melatih kaum perempuan untuk menggunakan hak politik mereka untuk berdemokrasi agar bisa meningkatkan kualitas partisipasi perempuan dalam politik. Banyak

perempuan Indonesia yang tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk menentukan kualitas demokrasi di negeri ini.

Kurangnya pengetahuan politik bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi perempuan dalam perpolitikan di negeri ini adalah juga dukungan nilai-nilai budaya dan agama dipandang turut berperan di dalamnya. Agama, termasuk Islam, telah digunakan sedemikian rupa untuk melanggengkan pemisahan ruang publik untuk laki-laki dan ruang privat untuk perempuan.

Politik hampir selalu disebut-sebut sebagai domain laki-laki hingga perempuan dianggap tak pantas untuk berpartisipasi di dalamnya. Karena itu, program pendidikan pemilih bagi perempuan, terutama yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi perempuan Muslim, tidak boleh hanya menekankan ide tentang hak politik perempuan sebagai hak-hak asasi dan bahwa pengalaman perempuan itu perlu dipertimbangkan dalam kebijakan publik, tetapi juga menekankan bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini menjamin hak-hak politik perempuan sepenuhnya.²³

Qur'an juga mendorong perempuan dan laki-laki untuk terlibat dalam mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka melalui syura, mekanisme pengambilan keputusan kebijakan publik dalam Islam. Ini menunjukkan Islam melihat perempuan sebagai pihak yang berhak membentuk

²³Ridwan Tohopi, Lingkungan pendidikan mempengaruhi perempuan dalam berdemokrasi, 2015, Hlm. 104

kebijakan publik. Qur'an bahkan menyatakan bahwa Muslim dan Muslimah adalah partner dalam menegakkan kebajikan dan mencegah kemunkaran.²⁴

2.2.5 Budaya

Teori kebudayaan dapat digunakan untuk keperluan praktis, memperlancar pembangunan masyarakat, di satu sisi pengetahuan teoritis tentang kebudayaan dapat mengembangkan sikap bijaksana dalam menghadapi serta menilai kebudayaan-kebudayaan yang lain dan pola perilaku yang bersumber pada kebudayaan sendiri.

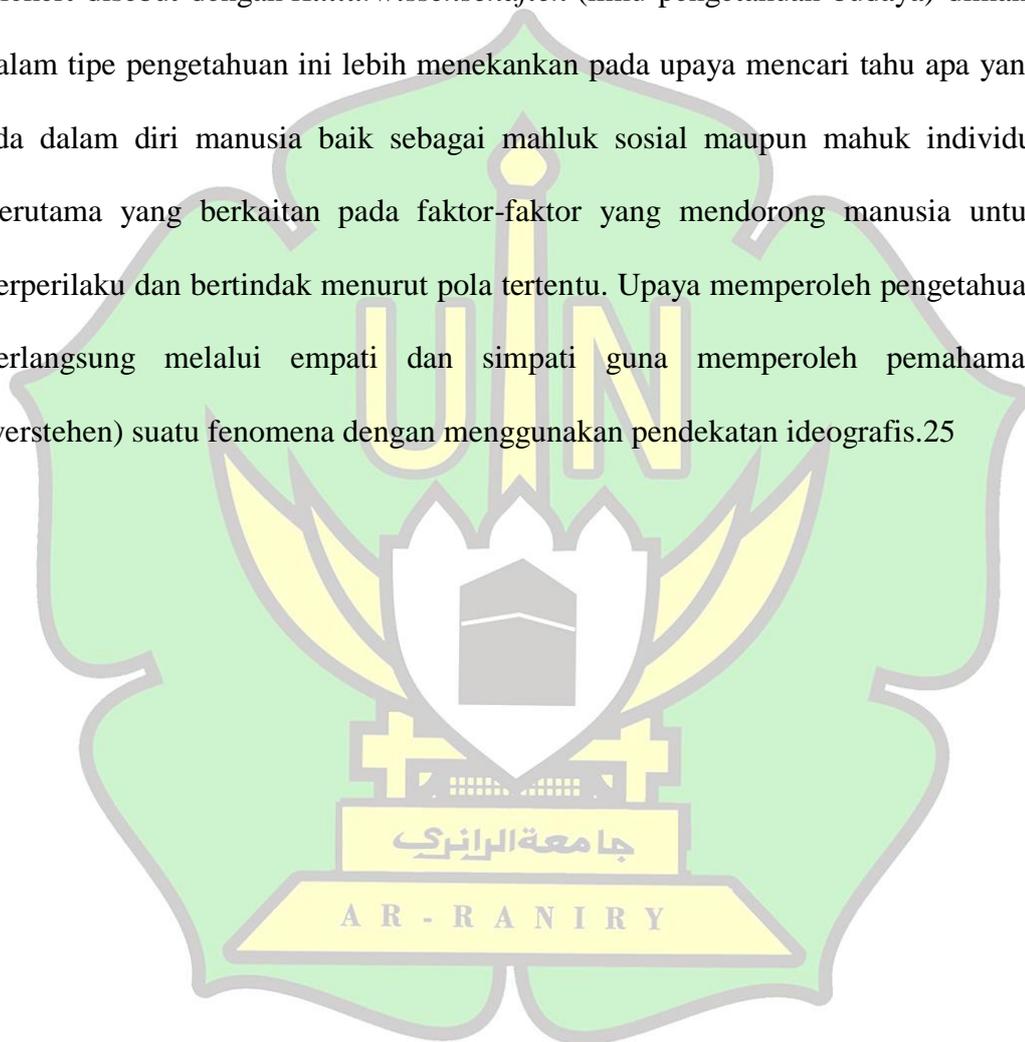
Secara garis besar hal yang dibahas dalam teori kebudayaan adalah memandang kebudayaan sebagai, (a) Sistem adaptasi terhadap lingkungan. (b) Sistem tanda. (c) Teks, baik memahami pola-pola perilaku budaya secara analogis dengan wacana tekstual, maupun mengkaji hasil proses interpretasi teks sebagai produk kebudayaan. (d) Fenomena yang mempunyai struktur dan fungsi. (e) Dipandang dari sudut filsafat.

Jika menilik pembagian keilmuan seperti yang diungkapkan oleh Wilhelm Dilthey dan Heinrich Rickert, mereka membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua bagian, yaitu *Naturwissenschaften* (ilmu pengetahuan alam) dimana dalam proses penelitiannya berupaya untuk menemukan hukum-hukum alam sebagai sumber dari fenomena alam. Sekali hukum ditemukan, maka ia dianggap berlaku secara universal untuk fenomena itu dan gejala-gejala yang berkaitan dengan fenomena

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 1993), Hlm.114

itu tanpa kecuali. Dalam *Naturwissenschaften* ini yang ingin dicari adalah penjelasan (*erklären*) suatu fenomena dengan menggunakan pendekatan nomotetis.

Hal lain adalah *Geisteswissenschaften* (ilmu pengetahuan batin) atau oleh Rickert disebut dengan *Kulturwissenschaften* (ilmu pengetahuan budaya) dimana dalam tipe pengetahuan ini lebih menekankan pada upaya mencari tahu apa yang ada dalam diri manusia baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk individu. Terutama yang berkaitan pada faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperilaku dan bertindak menurut pola tertentu. Upaya memperoleh pengetahuan berlangsung melalui empati dan simpati guna memperoleh pemahaman (*verstehen*) suatu fenomena dengan menggunakan pendekatan ideografis.²⁵



²⁵ Arif Wibowo, Teori kebudayaan dan ilmu pengetahuan budaya, 2008. Hlm. 23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui keterlibatan Masyarakat sipil Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (*Musrenbang Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh*) Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dan analisis Komparatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²⁶ Analisis komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih.²⁷ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul. Penelitian kualitatif memiliki tiga komponen utama sebagaimana dikemukakan oleh Strauss, sebagai berikut:²⁸

1. Ada data yang datang dari berbagai sumber. Wawancara dan observasi merupakan sumber-sumber yang paling umum digunakan.
2. Dalam penelitian kualitatif terdiri atas prosedur-prosedur analisis atau interpretasi yang berbeda yang digunakan untuk sampai pada temuan atau teori. Prosedur-prosedur itu termasuk teknik-teknik untuk konseptualisasi

²⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.11

²⁷ Ulber Silalahi, Metode penelitian sosial, Bandung: Unpar Press, 2006, Hal. 39

²⁸http://www.academia.edu/32993954/Metode_Penelitian_kualitatif. diakses pada tanggal 15 Desember 2020, jam 22.00

data. Proses ini disebut “pengodean” (coding), yang bermacam-macam karena pelatihan, pengalaman dan tujuan peneliti.

3. Laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiensi dan aspek temuan teori yang ditunjukkan. Misalnya, seseorang bisa memaparkan peninjauan luas (overview) seluruh temuan atau diskusi mendalam tentang satu bagian dari kajian.

Menurut J.R. Raco bahwa dalam penelitian setiap informasi yang didapatkan bisa saja mengubah arah penelitian, ini terjadi bahwa ada praduga dan asumsi peneliti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh partisipan.²⁹

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian akan membahas tentang Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Desa (*Studi Kasus Musrenbang Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh*)

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Jawa kecamatan Kuta Raja dan Gampong Beurawe Kota

²⁹ J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulanny, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), hal.8

Banda Aceh dengan pertimbangan gampong tersebut masih tertinggal dari segi pembangunan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah:

- Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Didalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi,wawancara langsung dengan komunikan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs- situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini,selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.- R A N I R Y

3.5 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Geuchik/sekretaris desa Gampong Beurawe	1
2	Geuchik/sekretaris desa Gampong Jawa	1
3	Perwakilan PKK Gampong Beurawe	1

4	Perwakilan PKK Gampong Jawa	1
5	Kelompok perempuan di Gampong Beurawe	1
6	Kelompok perempuan di Gampong Jawa	1

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang

³⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308

mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).³¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.³²

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

- Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

- Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik

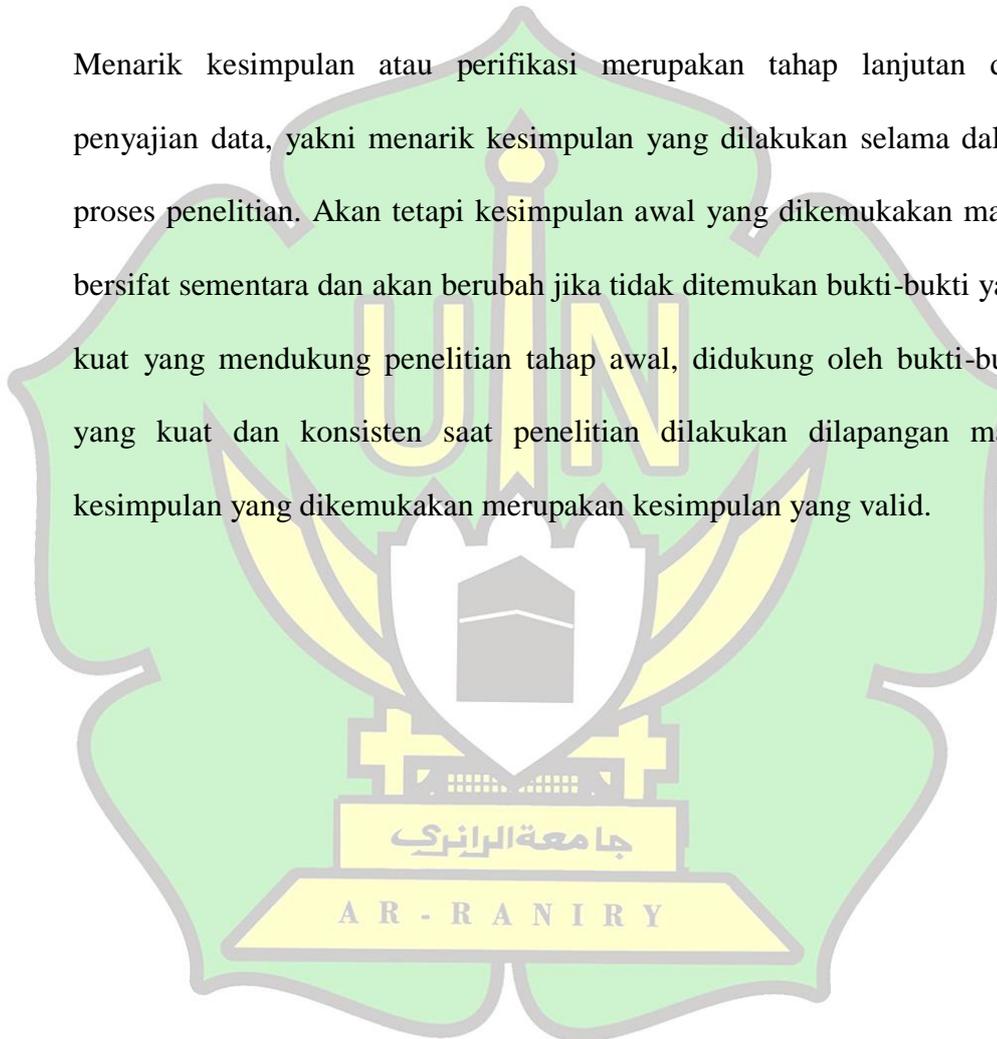
³¹ Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.23

³² Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

- Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Kota Banda Aceh: Sosial

- **Profil Kota Banda Aceh**

Wilayah Kota Banda Aceh sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Luas Wilayah dan Jumlah Gampong Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh, 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Gampong
(1)	(2)	(3)
Meuraxa	7,26	16
Jaya Baru	3,78	9
Banda Raya	4,79	10
Baiturrahman	4,54	10
Lueng Bata	5,34	9
Kuta Alam	10,05	11
Kuta Raja	5,21	6
Syiah Kuala	14,24	10
Ulee Kareng	6,15	9
Banda Aceh	61,36	90

(Sumber: BPS Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2020)

Secara Administrasi, Kota Banda Aceh terdiri dari sembilan kecamatan dan 90 *gampong* (desa). Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng.³³

³³ BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda 2020, Hlm. 13

- **Tingkat Pendidikan**

Angka Partisipasi Sekolah (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Hal ini menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.³⁴

Angka Partisipasi Murni Menurut Kelompok Umur di Kota Banda Aceh, 2020

Jenjang Pendidikan	APM
(1)	(2)
SD	99,74
SMP	86,02
SMA	81,51

(Sumber: BPS Indikator kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2020)

APM untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2020 sebesar 99,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid SD yang berumur 7-12 tahun sebanyak 99,94 persen dan selebihnya merupakan murid SD yang berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun.

Pada jenjang Pendidikan SMP, APM sebesar 86,02 persen yang berarti bahwa hanya 86,02 persen penduduk usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SMP/ sederajat dan selebihnya masih duduk di bangku SD ataupun sudah di

³⁴ Ibid, Hlm. 44

bangku SMA. Demikian juga dengan APM SMA yang hanya 81,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 81,51 persen penduduk usia 16-18 tahun yang duduk di bangku SMA sedangkan sisanya masih duduk di bangku SMP ataupun sudah melanjutkan ke perguruan tinggi.³⁵

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indicator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh



(Sumber: BPS Indikator kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2020)

Berdasarkan data tabel di atas Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh, pada tahun 2016 menunjukkan angka 83.73. Selanjutnya tahun 2017 menduduki angka 83.95. Pada tahun 2018 kedudukan 84.37, dan pada tahun 2020 menduduki angka 85.41. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan IPM Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

³⁵ Ibid, Hlm. 45

4.1.1 Gampong Beurawe

Secara administratif Gampong Beurawe merupakan salah satu desa dari sebelas yang terdapat di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Secara geografis, Gampong Beurawe memiliki posisi yang strategis di Kota Banda Aceh karena memiliki akses yang cukup luas dan dapat dicapai dari berbagai tempat di Kota Banda Aceh. Dengan kondisi tersebut maka Gampong ini mudah dijangkau oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan ke desa ini. Gampong Beurawe merupakan salah satu desa yang heterogen karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis yang ada di Aceh bahkan merupakan etnis luar Aceh.³⁶ Gampong Beurawe juga merupakan desa yang inklusif dan desa ini meraih prestasi juara 1 Lomba Gampong tingkat Kota Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Walikota, serta telah dinobatkan sebagai desa teladan dan Syariah pada tahun 2020.

³⁶ <http://beurawe-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>

Daftar penduduk Gampong Beurawe tahun 2020

No	Dusun	Perempuan	Laki-laki
1	Meunasah Kaye Jatoe	519 jiwa	285 jiwa
2	Meunasah Dayah	438 jiwa	374 jiwa
3	Meunasah Raya	474 jiwa	480 jiwa
4	Meunasah Kuta	1.466 jiwa	1.213 jiwa
5	Meunasah Ujong Blang	356 jiwa	335 jiwa
Total		3.253 jiwa	2.687 jiwa
		5.940 jiwa	
Persentase		54,76%	45,24%

(Sumber: Data Kependudukan Gampong Beurawe)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa proporsi penduduk perempuan di Gampong Beurawe lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Meskipun demikian, program-program yang berfokus pada pengembangan perempuan lebih sedikit dibandingkan program-program untuk penduduk laki-laki. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Program Musrenbang Gampong Beurawe Tahun 2020

No.	Laki-laki	Perempuan
1	Pembangunan rumah dhuafa 4 unit	Pelatihan membuat kue kering/basah bagi keluarga miskin dan bantuan peralatan pendukung usaha kue untuk 20 orang.
2	Rehab dan pembangunan jalan sekitar desa	Bantuan peralatan modal usaha menjahit.
3	Penutupan saluran jalan	Pelatihan menjahit dasar 16 orang.
4	Rehab balai pengajian	Pengadaan perlengkapan Posyandu atau ranjang dari dinas kesehatan.
5	Pelatihan kepemimpinan bagi pemuda gampong	Pengadaan <i>mobile</i> Posyandu
6	Penyuluhan narkoba	Pemberdayaan ekonomi, agama serta pemberdayaan perempuan gampong
7	Pengadaan kitab	Sosialisasi di bidang kebudayaan dan keagamaan
8	Pelatihan ketrampilan pemuda gampong	
9	Pelatihan bengkel sepeda motor	
10	Pelatihan manajemen usaha	
11	Pembangunan toko/warung	
12	Pengadaan bibit ikan lele dan ikan nila	
13	Penyuluhan tentang penanganan sampah gampong	
14	Pengadaan mobil operasional pengangkutan sampah gampong	
15	Pemberdayaan ekonomi lemah, modal usaha	

(Sumber: Data Pengajuan Program Musrenbang Gampong Beurawe)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa program yang diajukan pada Musrenbangdes Gampong Beurawe tahun 2020, untuk laki-laki di setujui 15 program, sedangkan untuk perempuan 7 program yang di setujui. Jika dilihat dari program perempuan lebih pembangunan ekonomi dan sosialisasi, sedangkan laki-laki lebih ke pembangunan infrastruktur.

4.1.2 Gampong Jawa

Gampong Jawa salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Gampong Jawa terletak di tengah-tengah perkotaan, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor kewirausahaan, jasa, dan pemerintahan; yaitu, nelayan, PNS dan wiraswasta.³⁷ Gampong Jawa dulunya dikenal sebagai pengelana laut, kini dijuluki sebagai Kawasan miskin dan kumuh dan lebih dikenal sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Banyak masyarakat disana tinggal di tepian sungai. Di Dusun Ujung, gubuk kecil dengan dinding triplek tumbuh subur. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di situ adalah pemulung, sehari-harinya mereka mengais sampah di TPA sampah demi hidup.³⁸

جامعة الرانيري
Daftar penduduk Gampong Jawa Tahun 2020
A R - R A N I R Y

No	Dusun	Perempuan	Laki-laki
1	Nyak Raden	175 jiwa	194 jiwa
2	Hamzah Yunus	202 jiwa	205 jiwa
3	Tuan Dibanda	218 jiwa	227 jiwa

³⁷ <https://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3887>

³⁸ <https://beritagar.id/media/galeri-foto/gerbang-laut-yang-kini-miskin-dan-kumuh>

4	Said Usman	429 jiwa	440 jiwa
5	Tgk. Muda	503 jiwa	434 jiwa
Total		1.527 jiwa	1.500 jiwa
		3.027 jiwa	
Persentase		50,44%	49,56%

(Sumber: Data Kependudukan Gampong Jawa)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa proporsi penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun demikian, program yang dikhususkan untuk pengembangan perempuan lebih sedikit dibandingkan program-program yang didominasi kelompok laki-laki, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Program Musrenbang Gampong Jawa Tahun 2020

No.	Laki-laki	Perempuan
1	Pembangunan rumah sehat sederhana	Bantuan peralatan modal usaha menjahit.
2	Pembangunan dan peningkatan jalan	Sosialisasi di bidang kebudayaan dan keagamaan
3	Pembangunan saluran drainase (pakai wiremesh)	Pelatihan membuat kue kering/basah dan bantuan peralatan pendukung usaha kue
4	Pengadaan balai pengajian	Bantuan modal usaha ikan asin.
5	Peningkatan renovasi balai pengajian	

(Sumber: Data Pengajuan Program Musrenbang Gampong Jawa)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa program yang diajukan pada Musrenbangdes Gampong Jawa tahun 2020, untuk laki-laki di setujui 5 program sedangkan untuk perempuan hanya 4 program. Jika dilihat program perempuan lebih pada bantuan dan sosialisasi yang kurang mendukung untuk pembangunan yang berbasis gender

4.2 Tingkat Partisipasi Perempuan Gampong Beurawe dan Gampong Jawa dalam Musrenbang

4.2.1 Tingkat Partisipasi Perempuan Gampong Beurawe

Untuk mengukur tingkat partisipasi, perhitungan terhadap jumlah kehadiran dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk mendapatkan gambaran sejauh mana partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes Gampong Beurawe. Berikut data kehadiran perwakilan perempuan pada Musrenbangdes di Gampong Jawa dari tahun 2018 hingga 2020.

Data kehadiran perempuan pada Musrenbangdes Gampong Beurawe Tahun 2018-2020

Tahun	Total Undangan	Kehadiran Perempuan
2018	15 undangan, 4 orang perempuan	4 orang
2019	15 undangan, 4 orang perempuan	3 orang
2020	15 undangan, 4 orang perempuan	3 orang

(Sumber: Daftar undangan Musrenbang Gampong Beurawe)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kehadiran perempuan pada Musrenbangdes Gampong Beurawe pada tahun 2018 sangat baik dimana dari 4 undangan semua ikut berpartisipasi. Pada tahun 2019, dari 4 undangan 3 yang

berhadir dan pada tahun 2020 juga sama seperti tahun 2019, dari 4 undangan hanya 3 orang yang menghadiri Musrenbangdes. Hal ini menandakan partisipasi perempuan dalam musrenbangdes Gampong Beurawe menurun dari tahun 2018 sampai 2020, namun masih tergolong baik. Seperti yang diakui pula oleh Sekdes Gampong Beurawe dalam wawancaranya:

“Partisipasi perempuan dalam Musrenbang lumayan baik, setiap rapat kita libatkan tapi belum maksimal, dari Beurawe ada PKK, dari unsur tuha 4 ada 2 perwakilan orang perempuan, tetap diundang.”³⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan, dalam hal ini dilihat dari kehadirannya dalam Musrenbangdes Gampong Beurawe bisa dikatakan sangat baik, namun belum maksimal dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu. Namun, jika dilihat dari data di atas, persentase kehadiran perempuan pada Musrenbangdes Gampong Beurawe sudah baik yakni mencapai 75%-100% dari total undangan yang diberikan.

Lebih jauh lagi, berdasarkan temuan di lapangan, tingkat partisipasi perempuan Gampong Beurawe tergolong baik dikarenakan mulai meningkatnya kesadaran perempuan akan haknya dalam pembangunan desa. Perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbangdes adalah perempuan-perempuan yang pada kesehariannya cukup aktif di desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sekdes dalam wawancaranya:

“Partisipasi perempuan termasuk baik karena adanya kesadaran dari perempuannya sendiri. Dengan kesadarannya tersebut, perempuan mengetahui apa apa saja haknya. Dan memang yang ikut terlibat adalah perempuan-perempuan yang biasanya aktif dalam pembangunan desa,

³⁹ Wawancara dengan Raziah, Sekretaris Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2021

sehingga mereka cukup aktif pula menyampaikan pendapatnya ketika Musrenbangdes.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dari kelompok perempuan di Gampong Beurawe sudah cukup baik. Hal ini tidak hanya terlihat dari keikutsertaan mereka dalam Musrenbangdes, tapi juga dibuktikan dari peran mereka yang cukup aktif di luar Musrenbangdes. Tidak mengherankan kemudian mengapa banyak pula program-program yang terkait dengan kebutuhan perempuan banyak dibahas dalam Musrenbangdes Gampong Beurawe. Hal ini karena kelompok perempuan pun cukup vokal dalam menyuarkan kepentingan-kepentingan mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa kesadaran akan hak yang mereka miliki telah mendorong partisipasi yang baik dari kelompok-kelompok perempuan dalam kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan di Gampong Beurawe. Hal ini juga turut didasarkan pengetahuan yang mereka miliki akan adanya kegiatan Musrenbangdes yang secara reguler dilaksanakan setiap tahun juga bagaimana kegiatan tersebut dapat mendorong pengakomodasian kebutuhan-kebutuhan perempuan di gampong, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekdes Gampong Beurawe dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk beberapa tahun terakhir ini, saya melihat perempuan-perempuan sudah mengetahui bahwa setiap tahun itu ada pelaksanaan Musrenbang di gampong. Dan seingat saya dulu ada yang disebut Musrena, tapi semenjak 2020-2021 digabung dalam Musrenbang. Partisipasi perempuan itu juga

⁴⁰ Wawancara dengan Raziah, Sekretaris Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2021

didasarkan oleh kesadaran perempuan dalam mewujudkan pembangunan desa yang pro terhadap perempuan."⁴¹

Jika merujuk pada teori yang disampaikan oleh Vaneklasen dan Miller, tingkat partisipasi perempuan di Gampong Beurawe pada Musrenbangdes dapat dikategorikan dalam partisipasi interaktif dan partisipasi konsultatif, dimana partisipasinya sudah lebih dari sekedar partisipasi simbolis dan partisipasi pasif di mana peserta hanya hadir untuk memenuhi undangan saja tanpa memberikan masukan apapun. Partisipasi konsultatif sendiri dapat dilihat dari keikutsertaan peserta dalam ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat kegiatan berlangsung. Sementara itu, perempuan di Gampong Beurawe juga turut berpartisipasi secara interaktif. Partisipasi interaktif di sini dipahami sebagai keikutsertaan dalam upaya mengembangkan dan merumuskan rencana kerja. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan Gampong Beurawe sudah berusaha berpartisipasi dengan baik dalam kegiatan musrenbang karena perempuan sudah mengetahui betapa pentingnya kegiatan Musrenbang tersebut dalam mendukung pembangunan yang berbasis gender dan pro terhadap pemenuhan hak perempuan.

Selanjutnya, merujuk kepada partisipasi yang dinyatakan oleh Ericson, dapat dilihat bahwa partisipasi perempuan Gampong Beurawe pada Musrenbangdes sudah tergolong sangat baik dalam memenuhi karakteristik tahap perencanaan (idea planning stage), dimana keikutsertaan seseorang dilakukan pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan

⁴¹ Wawancara dengan Raziah, Sekretaris Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2021

kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.

4.2.2 Tingkat Partisipasi Perempuan Gampong Jawa

Untuk mengukur tingkat partisipasi, perhitungan terhadap jumlah kehadiran dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk mendapatkan gambaran sejauh mana partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes Gampong Beurawe. Berikut data kehadiran perwakilan perempuan pada Musrenbangdes di Gampong Jawa dari tahun 2018 hingga 2020.

Data kehadiran perempuan pada Musrenbangdes Gampong Jawa 2018-2020.

Tahun	Total Undangan	Kehadiran Perempuan
2018	15 undangan 4 orang perempuan	2 orang
2019	15 undangan 4 orang perempuan	3 orang
2020	15 undangan 4 orang perempuan	3 orang

(Sumber: Daftar undangan Musrenbang Gampong Jawa)

Berdasarkan data tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, partisipasi perempuan pada Musrenbangdes, dari 4 undangan hanya 2 orang yang hadir. Pada tahun 2019, dari 4 undangan 3 orang yang hadir sedangkan pada tahun 2020 sama dengan tahun 2019 hanya 3 orang yang hadir dari 4 undangan. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat partisipasi ataupun kehadiran

perempuan dalam Musrenbangdes dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat di Gampong Jawa.

Adapun yang menjadi alasan partisipasi perempuan dalam kegiatan Musrenbang Gampong Jawa masuk dalam kategori baik dikarenakan pimpinan desa gampong tersebut sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa terlibat dalam Musrenbangdes sangat penting dalam mendukung pembangunan desa. Terlebih terhadap perempuan di mana perempuan harus sadar akan kepentingannya. Dalam Musrenbangdes tersebut perempuan dapat menyalurkan aspirasinya yang mampu mendukung kesejahteraan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Geuchik Gampong Jawa dalam wawancaranya:

“kita sering sosialisasi dengan masyarakat agar masyarakat mau terlibat dan mengetahui bahwa musrenbangdes tersebut sangat penting, terlebih perempuan karena pembangunan yang akan mensejahterakan perempuan dapat dicapai melalui aspirasi dari perempuan itu sendiri, jadi untuk mewujudkan pembangunan desa yang cocok untuk perempuan maka perempuan harus terlibat didalamnya.”⁴²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan pembangunan desa yang suportif terhadap perempuan dan menjamin kesejahteraan perempuan maka perempuan harus ikut terlibat dalam musrenbangdes. Untuk mencapai hal tersebut Geuchik Gampong Jawa rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa Musrenbang tersebut sangat penting dalam pembangunan yang mendukung kesejahteraan perempuan. Dengan begitu akan meningkatkan minat perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam Musrenbangdes.

⁴² Wawancara dengan Mukhlis, Kepala Desa Gampong Jawa. Pada tanggal 27 Juli 2021

Dalam mewujudkan partisipasi yang baik maka perempuan harus mengetahui pentingnya pelaksanaan Musrenbangdes tersebut. Hal ini dikarenakan agar perempuan sadar akan betapa pentingnya Musrenbangdes dalam pembangunan desa yang pro terhadap perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Geuchik Gampong Jawa dalam wawancaranya:

“Pada awalnya tidak mengetahui, akan tetapi karena kita sering sosialisasi dengan masyarakat terutama perempuan sekarang mereka mengetahui pentingnya musrenbangdes dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang pro perempuan.”⁴³

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Geuchik Gampong Jawa mampu memberi pengetahuan ke masyarakat terutama kepada perempuan bahwa kegiatan Musrenbang ini penting untuk mendukung dan mewujudkan pembangunan desa yang pro perempuan dan mensejahterakan perempuan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan di Gampong Jawa lumayan baik jika dilihat dari kehadiran peserta perempuan pada Musrenbangdes. Akan tetapi, jika dilihat dari aspek lain seperti keaktifan pada saat Musrenbang berlangsung, maka partisipasi perempuan Gampong Jawa masih tergolong rendah.

Jika merujuk pada landasan teori menurut Vaneklasen dan Miller, penulis melihat bahwa partisipasi perempuan Gampong Jawa pada Musrenbangdes lebih cenderung merupakan partisipasi simbolis di mana mereka berpartisipasi secara

⁴³ Wawancara dengan Mukhlis, Kepala Desa Gampong Jawa. Pada tanggal 27 Juli 2021

fisik saja namun tidak begitu aktif dalam penyampaian gagasan. Partisipasi simbolis sendiri dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi yang paling lemah di mana peserta hanya hadir dan duduk tanpa menyampaikan pandangan-pandangannya.

Kemudian jika merujuk kepada tingkat partisipasi yang dirumuskan Erickson, partisipasi perempuan di Gampong Jawa belum cukup baik pada tahap perencanaan (*idea planning stage*). Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan, seharusnya ada keterlibatan peserta yang cukup aktif dalam penyusunan rencana dan strategi serta penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek.

4.2.3 Indikator Musrenbangdes

Musrenbangdes Gampong Beurawe dan Gampong Jawa yang ingin di capai pada adalah:

- Penaggulan kemiskinan tingkat desa
- Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas tingkat desa
- Pengembangan kualitas kehidupan beragama dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tingkat desa
- *Good governance* tingkat desa
- Peningkatan kapasitas infrastruktur tingkat desa

4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi (non-partisipasi) perempuan di Gampong Beurawe dan Gampong Jawa

Jika merujuk kepada partisipasi perempuan dalam ruang demokrasi yang dipaparkan oleh Tohopi (2005), faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor agama sangat menentukan dalam tinggi atau rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam sebuah ruang demokrasi. Dalam bagian ini, akan dibahas satu per satu mengenai faktor-faktor tersebut dan bagaimana kaitannya dengan tingkat partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes di Gampong Beurawe dan Gampong Jawa.

4.3.1 Tingkat Pendidikan

Data tingkat Pendidikan di Gampong Beurawe (perempuan) Tahun 2020

No	Dusun	Mahasiswa 18-23 tahun	Pelajar 6-18 tahun
1	Meunasah Kaye Jatoe	191	254
2	Meunasah Dayah	189	247
3	Meunasah Raya	166	297
4	Meunasah Kuta	184	379
5	Meunasah Ujong Blang	183	239
Total		913	1.416

(Sumber: Data Pendidikan Gampong Beurawe 2020)

Data tingkat pendidikan di Gampong Jawa (perempuan) Tahun 2020

No	Dusun	Mahasiswa 18-23 tahun	Pelajar 6-18 tahun
1	Nyak Raden	9	24
2	Hamzah Yunus	19	25
3	Tuan Dibanda	24	33
4	Said Usman	35	47
5	Tgk. Muda	51	45
Total		138	174

(Sumber: Data Pendidikan Gampong Jawa 2020)

Berdasarkan data pendidikan perempuan di atas menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan perempuan Gampong Beurawe tergolong jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat Pendidikan perempuan di Gampong Jawa baik itu di level pelajar maupun level mahasiswa, di mana perempuan mengenyam pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melihat data mengenai tingkat pendidikan tersebut, dapat diasumsikan bahwa keterlibatan perempuan dalam Musrenbangdes turut dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan perempuan berkorelasi dengan kemampuan peserta memahami dan aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh sekretaris desa Beurawe dalam wawancaranya:

“Karena musrenbang adalah musyawarah rencana pembangunan, bisa dibilang yang paham tentang teknis dan program-program yang diajukan bergantung pada posisi apa orang itu di dalam gampong dan bagaimana latar belakang pendidikannya.”⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Raziah, Sekretaris Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2021

Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh perwakilan kelompok PKK Gampong Beurawe yang setuju bahwa tingkat Pendidikan perempuan memiliki pengaruh dalam keikutsertaan perempuan dalam kegiatan musrenbang, seperti yang diungkapkan dalam wawancaranya:

“Pendidikan memiliki pengaruh, karena pendidikan membantu mereka memahami teknis untuk pengajuan program gampong, serta mana yang layak diajukan untuk pembangunan gampong.”⁴⁵

Selanjutnya dari pihak kelompok perempuan Gampong Beurawe juga menyampaikan bahwa Pendidikan perempuan sangat berpengaruh dalam keaktifan perempuan mengikuti kegiatan musrenbangdes, karena Pendidikan merupakan suatu mekanisme untuk mewujudkan kesadaran perempuan dalam keterlibatan dan pemenuhan hak perempuan di desa. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancaranya:

“Pendidikan sangat berpengaruh karena dengan Pendidikan perempuan akan melek terhadap setiap situasi di desa perempuan yang berpendidikan tinggi akan mampu memahami dan melihat apa yang menjadi haknya.”⁴⁶

Sebaliknya, berdasarkan wawancara di Gampong Jawa dengan Kepala Desa Gampong Jawa, tingkat pendidikan perempuan tidak begitu mempengaruhi keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes di gampong tersebut. Hal ini sesuai pula dengan penuturan dari kelompok PKK Gampong Jawa yang mengatakan bahwa tingkat Pendidikan perempuan kurang berpengaruh dalam keikutsertaan perempuan dalam musrenbangdes, sebagaimana berikut:

⁴⁵ Wawancara dengan Herawati, Kelompok PKK Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2021

⁴⁶ Wawancara dengan Arina, Kelompok Perempuan Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2021

“Pandangan saya mengenai tingkat Pendidikan, mungkin sedikit kurang lebihnya, tingkat Pendidikan perempuan masih kurang di dalam musrenbang tersebut. Disebabkan karena rendahnya kapasitas atau rendahnya kemampuan masyarakatnya. Dalam hal ini sisi baik atau tidak baiknya mungkin perlu adanya tingkat Pendidikan yang lebih baik, agar dapat mendorong terjadinya perencanaan pembangunan desa tersebut. Dapat kita lihat juga, hanya sampai di perencanaan saja, tidak sampai kepada pembangunan berkelanjutan.”⁴⁷

Pihak kelompok perempuan Gampong Jawa juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Geuchik Gampong Jawa bahwa tingkat Pendidikan perempuan tidak begitu berpengaruh akan tetapi pengalaman memberikan tingkat pengaruh yang lebih besar. Seperti dalam wawancaranya:

“Tingkat pendidikan tidak begitu berpengaruh dalam keikutsertaan musrenbangdes akan tetapi tingkat pengalaman menjadi lebih penting”⁴⁸

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan perempuan di Gampong Beurawe dalam partisipasi perempuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan perempuan. Karena menurut informan Gampong Beurawe pendidikan menjadi suatu sistem mekanisme dalam merumuskan program Musrenbang. Sedangkan menurut informan Gampong Jawa tingkat pendidikan perempuan tidak begitu memberi pengaruh yang besar akan tetapi tingkat pengalaman menjadi lebih penting dibandingkan tingkat pendidikan dalam keikutsertaan perempuan dalam Musrenbangdes. Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan data di atas tingkat pendidikan tinggi memberi pengaruh besar dalam keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes.

⁴⁷ Wawancara dengan Sri, Kelompok PKK Gampong Jawa. Pada tanggal 27 Juli 2021

⁴⁸ Wawancara dengan Elly, Kelompok Perempuan Gampong Jawa. Pada tanggal 27 Juli

4.3.2 Faktor Budaya

Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan kegenerasi selanjutnya. Faktor budaya menjadi prioritas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Budaya Gampong Beurawe saat ini sangat menghargai perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Sekdes Gampong Jawa dalam wawancaranya:

“Budaya kita tinggi untuk menghargai perempuan, kan ga mungkin kita undang perempuan kalau rapat di malam hari. Mungkin itu bisa terpengaruhi dengan kondisi, apalagi di masjid rapatnya jadi akses rapat untuk gabung sama perempuan susah.”⁴⁹

Sedangkan menurut kelompok PKK Gampong Beurawe faktor budaya sangat mempengaruhi partisipasi perempuan dalam kegiatan Musrenbangdes karena perempuan di identik dengan keterbatasan dalam berdemokrasi dan sering dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki sehingga perempuan sulit untuk terlibat dalam perumusan. Seperti yang diungkapkan oleh kelompok PKK gampong beurawe dalam wawancanya:

“Faktor budaya sangat berpengaruh dalam partisipasi dimana perempuan sering sekali dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki. sehingga sedikit sulit bagi perempuan untuk ikut bergabung dalam perumusan kebijakan, hal tersebut membuat perempuan malas untuk terlibat dalam kegiatan Musrenbang.”⁵⁰

Selanjutnya menurut kelompok perwakilan perempuan Gampong Beurawe menurut mereka faktor budaya menjadi salah satu pengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes dimana selain faktor pendidikan faktor budaya

⁴⁹ Wawancara dengan Raziah, Sekretaris Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2021

⁵⁰ Wawancara dengan Herawati, Kelompok PKK Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2020

akan mampu mengambil peran penting dalam melihat perempuan terlibat dalam perumusan kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh kelompok perwakilan perempuan gampong beurawe dalam wawancaranya:

“Khususnya di daerah pedesaan, selain dari pada faktor tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan dsb, budaya juga bisa menjadi pemicu faktor-faktor yang dapat menghambat keikutsertaan mereka dalam partisipasi musrenbangdes.”⁵¹

Sedangkan dari Geuchik Gampong Jawa mengatakan bahwa faktor budaya juga sangat menentukan partisipasi perempuan dalam Musrenbangdes dimana Gampong Jawa selalu melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyampingan perempuan dalam perumusan kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Geuchik Jawa dalam wawancaranya:

“Itu sangat menentukan, karna budaya karakter daerah itu berbeda-beda maka kita selalu libatkan tokoh-tokoh perempuan agar tidak ada kesan bahwa kita menyampingkan perempuan dalam perumusan kebijakan. Sehingga perempuan berani berbicara dan mengemukakan pendapat.”⁵²

Kemudian menurut kelompok PKK Gampong Jawa mengatakan bahwa:

“Pengaruh budaya dapat memberi efek terhadap partisipasi perempuan dalam kegiatan musrenbang. Dimana perempuan dianggap sebagai orang di dapur tidak baik ikut dalam perumusan kebijakan. Dengan pandangan seperti itu perempuan menjadi malas untuk ikut dalam perumusan kebijakan. Hal ini membuat perempuan terus tertinggal dan tidak sejahtera.”⁵³

⁵¹ Wawancara dengan Arina, Kelompok Perempuan Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2020

⁵² Wawancara dengan Mukhlis, Kepala Desa Gampong Jawa. Pada tanggal 27 Juli 2021

⁵³ Wawancara dengan Sri, Kelompok PKK Gampong Jawa. Pada tanggal 27 Juli 2021

4.3.3 Faktor Agama

Dimana islam tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya ini sudah diterapkan oleh ulama saat itu. Seperti yang diungkapkan oleh Sekdes Gampong Beurawe dalam wawancaranya:

“Agama sepertinya tidak berpengaruh terlalu signifikan, paling kegiatannya pengajian, guru-guru paud, saya rasa tidak ada pengaruh yg signifikan yg bertentangan dengan agama, tetap perempuan kita libatkan dalam musrenbang.”

Kemudian menurut Geuchik Gampong Jawa mengatakan bahwa tidak terlalu berpengaruh faktor agama karena Gampong Jawa memberi kesempatan yang sama dalam berpendapat atau menyalurkan aspirasi. Seperti yang diungkapkan oleh Geuchik Gampong Jawa dalam wawancaranya:

“Tentu, karena kalau secara Pendidikan misal kalau guru itu kami nomor duakan, tapi yg nomor 1 itu harus diduduki oleh bidang agama apalagi klo pengajaran bidang agama tetap kami nomor satukan.”

4.3.4 Faktor lainnya

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, selain faktor-faktor di atas, ternyata tingkat partisipasi perempuan juga dapat dilihat dari faktor lainnya seperti faktor politik. Dalam wawancaranya Sekdes Gampong beurawe mengatakan:

“Sisi politisnya, gini ketika setiap berganti mulai dari kepala desa, camat, walikota, gubernur, murenbang ini meningkat dari desa ke nasional, jadi setiap apa-apa yg kita programkan itu ketika beralih pimpinan selalu berubah. Mungkin dari segi politisnya yang sangat terpengaruhi, jadi setiap kita ajukan program apapun, misal gampong itu ga milih saya, klo

tingkat walikota misal. Jadi pengaruh politisnya tinggi kalau dari factor lain.”⁵⁴

Sedangkan menurut Geuchik Gampong Jawa faktor lain yang sangat berpengaruh dari faktor pengalaman seperti yang dikatakan dalam wawancaranya:

“Faktor lain dari segi pengalaman, pengalaman-pengalaman dari para peserta musrenbang yang dimana apa yang mereka dapat di luar bisa mengajukan program-program yang layak untuk pembangunan gampong jawa.”⁵⁵

Beberapa faktor yang disebutkan di atas mampu memberi pengaruh besar dalam tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbangdes. Dengan faktor-faktor tersebut menjadi acuan dalam kehadiran perempuan dalam kegiatan musrenbangdes.

Berdasarkan hasil rekap daftar kehadiran dalam Musrenbangdes tahun 2018 dari 15 undangan yang mewakili perempuan 4 orang, pada tahun 2019 dari 15 undangan 4 orang perwakilan perempuan itupun 1 orang tidak dapat hadir, jadi di tahun 2019 hanya 3 orang perwakilan perempuan yang hadir. Sedangkan di Gampong Jawa berdasarkan hasil rekap daftar kehadiran dalam Musrenbang pada tahun 2018 dari 15 undangan perwakilan perempuan yang hadir hanya 2 orang saja yang seharusnya hadir 4 orang. Pada tahun 2019 dari 15 undangan perwakilan perempuan yang hadir hanya 3 orang dari yang seharusnya 4 undangan yang diberikan kepada perempuan. Kemudian pada tahun 2020 dari 15 undangan perwakilan perempuan yang hadir 3 orang dari yang seharusnya 4 undangan perwakilan perempuan.

⁵⁴ Wawancara dengan Raziah, Sekretaris Gampong Beurawe. Pada tanggal 27 Juli 2021

⁵⁵ Wawancara dengan Mukhlis, Kepala Desa Gampong Jawa. Pada tanggal 27 Juli 2021

Dari data di atas dapat dilihat minat hadir perempuan di gampong berawe dalam Musrenbangdes lebih dominan dibandingkan dengan kehadiran perempuan Gampong Jawa. Di samping itu, perempuan Gampong Beurawe lebih aktif terlibat dalam proses Musrenbang di bandingkan Perempuan Gampong Jawa. Dapat dilihat juga dari daftar program yang diajukan dalam Musrenbang, di Gampong Beurawe perempuannya lebih aktif dari perempuan Gampong Jawa sehingga program yang diajukan ke dalam Musrenbang banyak yang mendukung kebutuhan perempuan.

4.3.5 Evaluasi

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis merumuskan bahwa;

- a. Gampong Beurawe, tahun 2018 sampai 2020 angka partisipasi perempuan pada kehadiran Musrenbang di desa tersebut dapat di nilai lebih aktif dan efektif dalam mengikuti musyawarah pembangunan desa. Dan juga keaktivitas kelompok perempuan pada kegiatan juga pengaruh pada Pendidikan, faktor budaya serta agama dan faktor lainnya yaitu faktor politis.
- b. Gampong Jawa, untuk tahun 2018 sampai 2020 jumlah partisipasi perempuan dapat di nilai rendah di bandingkan dengan Gampong Beurawe secara signifikan. Sehingga penulis menyimpulkan efektivitas kelompok perempuan sangat pasif dan simbolis dalam berpartisipasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

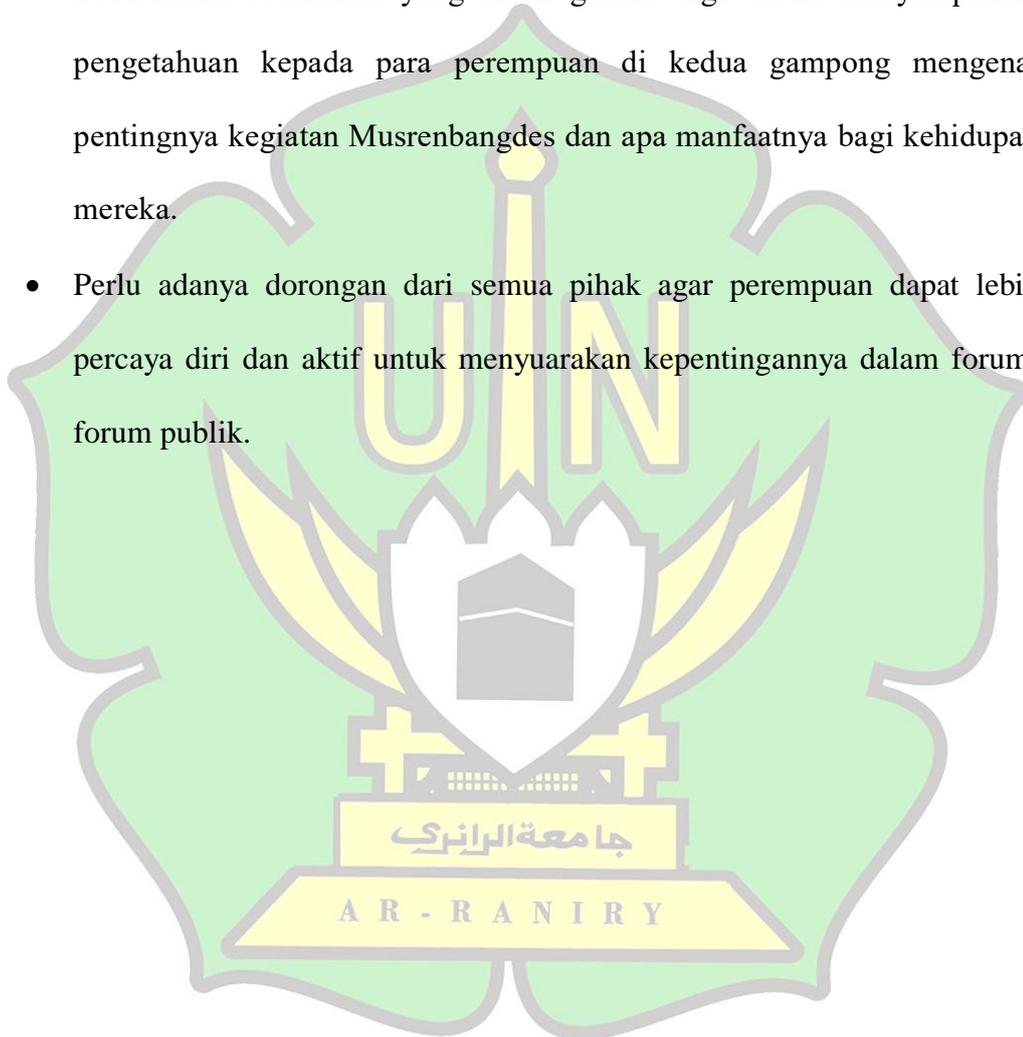
Berdasarkan pembahasan dan analisis data dalam penelitian tentang Studi Analisis Komparatif tentang Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Kasus: Musrenbang Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja dan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh), maka bab ini diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi Perempuan Gampong Beurawe lebih aktif terlibat dalam proses Musrenbangdes di bandingkan Perempuan Gampong Jawa jika dilihat dari kehadiran secara fisik. Dapat dilihat juga dari daftar program yang diajukan dalam Musrenbang, di Gampong Beurawe perempuannya lebih aktif dari perempuan Gampong Jawa sehingga program yang di ajukan ke dalam Musrenbang banyak yang suportif terhadap perempuan dari pada di Gampong Jawa.
2. Dapat dipahami bahwa partisipasi perempuan di Gampong Beurawe bersifat konsultatif dan interaktif, sementara partisipasi perempuan Gampong Jawa bersifat simbolis dalam Musrenbangdes di kedua gampong tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

- Dibutuhkan sosialisasi yang lebih gencar lagi untuk menyampaikan pengetahuan kepada para perempuan di kedua gampong mengenai pentingnya kegiatan Musrenbangdes dan apa manfaatnya bagi kehidupan mereka.
- Perlu adanya dorongan dari semua pihak agar perempuan dapat lebih percaya diri dan aktif untuk menyuarakan kepentingannya dalam forum-forum publik.



DAFTAR PUSTAKA

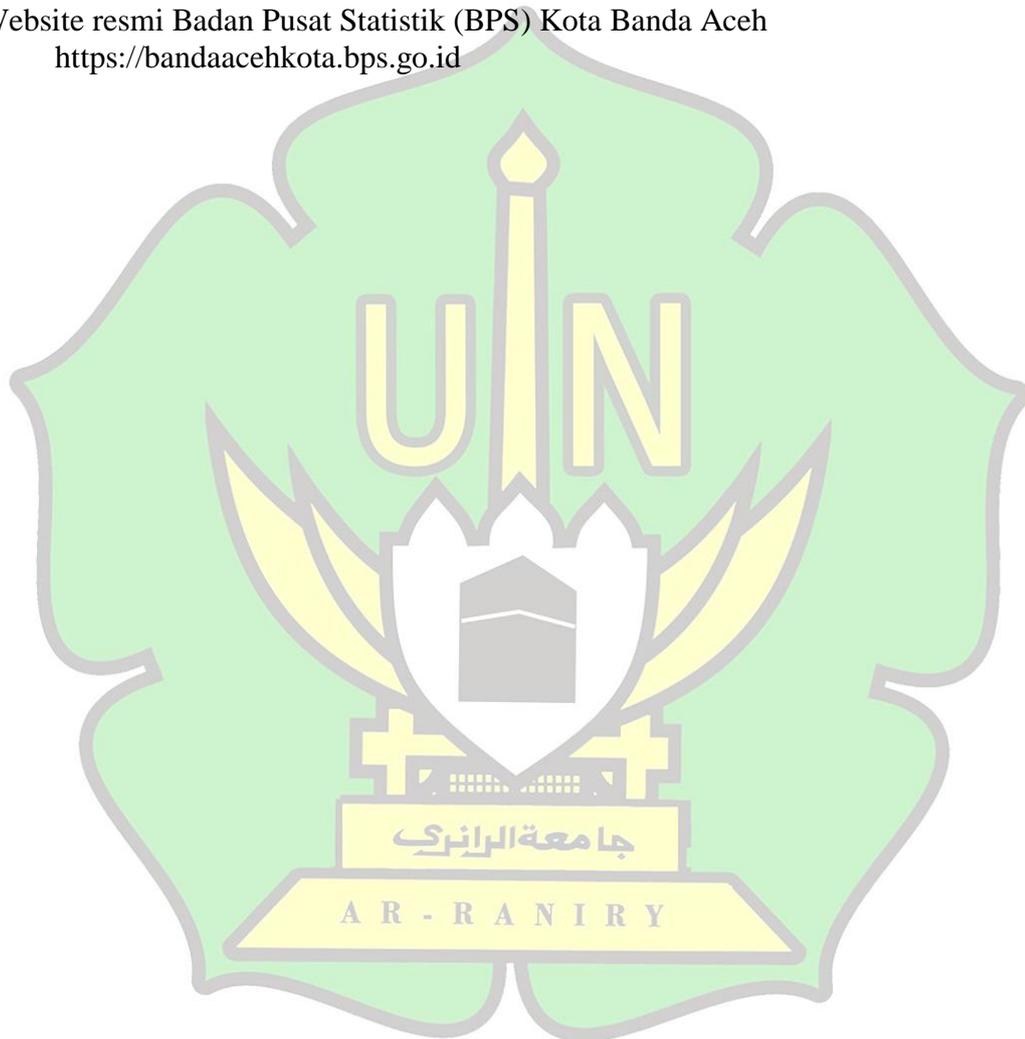
- Nandang dan Saeful, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. Bandung: Studio Driya Media, 2008.
- Ridwan Tohopi, Lingkungan pendidikan mempengaruhi perempuan dalam berdemokrasi. Jurnal: 2015
- Nawawi, Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial,. Yogyakarta: Gadjahmada University, 1995
- Karlinger, Asas-asas Penelitian Behaviour. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2014
- Agnes Pratitis Offi, DianaDewiSartika, dan Yunindyawati. Partisipasi Perempuan dalam perencanaan pembangunan. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016
- Sigalingging, Angelius Henry dan Warjio. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2, 2014
- J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulann, Jakarta: PT.Grasindo, 2010
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2008
- Fadil, Fathurrahman. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II, 2013
- Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Djumati, Hunia dkk. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal administrasi negara Vol. 1 No. 010. 2015
- Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya, Jakarta: Kencana, 2013
- Arif Wibowo, Teori kebudayaan dan ilmu pengetahuan budaya, Depok: PT. RajaGrafindo Persada 2008

Ulber Silalahi, Metode penelitian sosial, Bandung: Unpar Press, 2006

Depag RI, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, Bandung: Gema Risalah Press, 1993

Website resmi Badan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh
<http://bappeda.bandaacehkota.go.id/>

Website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh
<https://bandaacehkota.bps.go.id>



Lampiran Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam musrenbang?
2. Mengapa partisipasinya cukup baik/tidak baik?
3. Apakah ada pengaruh tingkat pendidikan dalam baik/tidak baiknya partisipasi mereka?
4. Apakah perempuan mengetahui pentingnya musrenbang?
5. Apakah factor budaya mempengaruhi keikutsertaan mereka dalam musrenbangdes?
6. Apakah mungkin pertimbangan agama turut mempengaruhi partisipasi mereka dalam musrenbangdes?
7. Apa factor lain yg mempengaruhi musrenbang, selain budaya dan agama?

